

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH
UMUR KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002**

**(Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N.
Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

DIMAS RAHMAT PRASTIKA
NPM : 0771010071

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH
UMUR KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002**

**(Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N.
Surabaya)**

Oleh :

DIMAS RAHMAT PRASTIKA

NPM : 0771010071

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Subani, SH., M.Si.

NIP. 19510504 198303 1 001

Yana Indawati, SH., M.Kn.

NPT. 3 7901 07 0224

**Mengetahui,
Dekan**

Haryo Sulistiyantoro, SH, MM

NIP. 196206251991031001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH
UMUR KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002**

**(Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N.
Surabaya)**

Oleh :

DIMAS RAHMAT PRASTIKA
NPM : 0771010071

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 10 juni 2011**

Menyetujui,

Tim Penguji,

Tanda Tangan,

**1. H. Sutrisno, SH, M.Hum
NIP. 196012121988031001**

(.....)

**2. Haryo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 196206251991031001**

(.....)

**3. Subani, SH, M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001**

(.....)

Mengetahui,

Dekan,

Haryo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 196206251991031001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH
UMUR KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002**

**(Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N.
Surabaya)**

Oleh :

DIMAS RAHMAT PRASTIKA
NPM : 0771010071

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 10 juni 2011**

Menyetujui,

Tim Penguji,

Tanda Tangan,

**1. H. Sutrisno, SH, M.Hum
NIP. 196012121988031001**

(.....)

**2. Haryo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 196206251991031001**

(.....)

**3. Subani, SH, M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001**

(.....)

Mengetahui,

Dekan,

Haryo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 196206251991031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Rahmat Prastika
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 31 Oktober 1989
NPM : 0771010071
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Tanah Merah No. 2

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR
KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* (Studi Kasus Putusan PN Surabaya No.
Perkara 1007/Pid.B/2009/PN Surabaya)” dalam rangka memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya
cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan
hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka
saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Surabaya, 10 Juni 2011
Penulis

Subani, SH., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Dimas Rahmat Prastika
NPM. 0771010071

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, sang pemberi nafas hidup yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Penelitian ini. Dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N. Surabaya).

Penelitian ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, demi mengadakan pembaharuan bagi penegakan hukum dimasa yang akan datang.

Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum.

3. Bapak Subani SH, MSi, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum dan sebagai dosen wali sekaligus dosen pembimbing utama yang memiliki empati terhadap penyusun.
4. Ibu Yana Indawati, SH, M.Kn, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersabar meluruskan kesalahan-kesalahan penyusun.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Pejabat Pengadilan Negeri Surabaya, yang telah membantu penyusun dengan mempermudah mendapatkan contoh kasus yang sesuai.
7. Pejabat Kejaksaan Negeri Surabaya, yang memberikan izin untuk mendapatkan surat dakwaan dan tuntutan.
8. Eyang (Suwardhi Ningsih dan Sri Mulyani), Ayah (Prasetijono), Ibu (Sueka Arijani), Tante (Sajekti Setyo Utami) dan adik-adikku (Dinda Mutiara Sukma Prastika, Bela Puspita Hapsari dan Faiz Maulana Arza Dani), yang telah memberikan dorongan, semangat, dan pengertiannya bagi penyusun baik secara moril dan materiil.
9. Sahabat seperjuangan, Dimas Nuruddin Mufti, Josua Mampetua Sirait, Rizal Ranga Adiyatama, Rizka Alifiya Wiramiharja, Ricky Herdian dan Shafareza Erviansyah Adhinegara yang selalu memberi penyusun masukan dan pencerahan selama mengerjakan.
10. Teman-teman terbaik yang selalu ada, *canteen crew* (Mbak Dian, Mbak Diah, Gede Nengah Tulus Wira Utama, Windy Asmoro, Rey Kristiansyah,

dan Farid Azhar) atas kesediaannya berbagi waktu dan nasihat, *Poker Holic* (Andy Setiawan, Muhamad Faruq dan Gufron) atas semua malam yang telah dihabiskan untuk menemani mengerjakan penelitian ini, serta Yamiskin Group (Hari Cahyadi, Ardan Udika Oktava, Adinda Basuki Tunggal Wicaksono, Agung Dwi Hartono, Rezky Darmawan Aribowo, Rhamdan Arrosyid, Zendy Wirayuda dan Vicky Gusti) atas canda dan tawa yang menggembarakan di siang hari yang terik.

11. Teman-teman di kampus yang selalu menyemangati dengan telah menjadi sarjana terlebih dahulu. Sigit Purnomo, Argo Krisinaranto dan Ari Handoko.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini jauh dari sempurna. Karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penyusun harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN REVISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
1. Tindak Pidana <i>Trafficking</i>	6
2. Tinjauan Umum Tentang Anak	12
3. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	15
4. Pelaku Tindak Pidana	16
5. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Trafficking</i>	19

6. Upaya Hukum	23
7. Pengertian Perlindungan Hukum	27
8. Sifat Perlindungan Hukum	28
9. Putusan Pengadilan	30
10. Banding	31
F. Metodologi Penelitian	33
1. Pendekatan Masalah	33
2. Sumber Data	34
3. Metode Pengumpulan Data	36
4. Metode Analisis Data	36
5. Pertanggungjawaban Sistematika	37

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI

BAWAHUMUR KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* 39

A. Duduk Perkara	39
B. Dakwaan	40
C. Tuntutan	40
D. Analisis	40

BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KORBAN

***HUMAN TRAFFICKING* AGAR BISA MENJERAT PELAKUNYA**

DENGAN HUKUMAN YANG LEBIH BERAT 47

A. Upaya Hukum Preventif	47
--------------------------------	----

B. Upaya Hukum Represif	49
C. Analisis	50
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR ISI



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM-354/Ep.2/03/2010

Lampiran 2 : Surat Tuntutan No. Reg Perkara : PDM-354/Ep.2/03/2010

Lampiran 3 : Putusan No. 1007/Pid.B/2010/P.N. Surabaya



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Dimas Rahmat Prastika
NPM : 0771010071
Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 31 Oktober 1989
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH
UMUR KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002**

**(Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N.
Surabaya)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur korban *human trafficking*. Latar belakang yang digunakan adalah adanya penilaian yang mengelompokkan Indonesia dalam peringkat 3 negara bermasalah dalam pemberantasan *human trafficking* oleh dunia Internasional.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, fenomena yang ada pada latar belakang masalah akan dipadukan dengan studi kepustakaan dan pemikiran penyusun yang dikembangkan.

Analisa yang dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang saat ini diberikan oleh beberapa Undang- Undang seperti KUHP, KUHP, Undang-Undang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban agar bisa menjerat pelakunya dengan hukuman yang lebih berat.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *trafficking* merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena banyak mengancam para perempuan di bawah umur untuk dijadikan korban. Perlindungan hukum terhadap korban saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari sangat jarang pidana yang berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku. Belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia juga menambah adanya rasa ketidakadilan pada korban perdagangan manusia yang telah menderita baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap kestabilan negara kita karena perempuan di bawah umur pada hakekatnya adalah penerus cita-cita kartini Indonesia.

Kata Kunci : perempuan di bawah umur, *human trafficking*, perlindungan hukum, upaya hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus *human trafficking* khususnya perempuan di bawah umur kembali ramai dibicarakan masyarakat. Hal ini menjadi topik yang sangat besar karena korbannya mayoritas adalah perempuan di bawah umur, yang lebih buruk salah satu dari pelakunya adalah teman dekat mereka atau bahkan orang tua mereka sendiri. Orang tua yang seharusnya melindungi anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, kurang memberikan perhatian yang lebih kepada anak mereka. Isu *human trafficking* yang marak dibicarakan saat ini jangan dipandang sebelah mata. Masalah ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di negara kita. Oleh karena itu banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan *human trafficking*. Lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, *human trafficking* dianggap memberi kesempatan yang lebih baik mendapatkan uang. Banyak perempuan di bawah umur dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji yang diberikan oleh para *trafficker* untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya bahkan dipaksa untuk menjadi pelacur.

Namun tidak hanya itu, selain dari aspek ekonomi, kurangnya aspek pendidikan yang diperoleh masyarakat juga menjadi penyebab maraknya *human trafficking*. Dengan kata lain pemahaman masyarakat terhadap masalah masih kurang. Secara umum, *human trafficking* terjadi karena ketidaktahuan perempuan di bawah umur akan pekerjaan yang ditawarkan oleh anggota sindikat, padahal tidak satupun perempuan di bawah umur berkeinginan mendapat pekerjaan sebagai pelacur.

Human trafficking merupakan masalah yang sensitif. Dan untuk mengentaskan persoalan itu sendiri harus ada campur tangan antara masyarakat dan pemerintah, karena yang memegang peranan penting adalah kedua belah pihak itu sendiri.

Salah satu peranan penting pemerintah adalah mengatasi masalah yang mendasar seperti penanggulangan masalah kemiskinan. Dan satu kata kunci yang penting adalah “pemberdayaan”. Hal ini sangat penting bagi korban. Banyak para korban yang mengalami kebingungan akan berbuat apa dan akan bekerja apa. Maka disini peranan pemerintah sangatlah penting dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi para korban agar mereka tidak terjerat lagi dalam permasalahan yang sama.

Oleh karena itu *human trafficking* bukanlah suatu fenomena baru lagi di negara kita, dan meskipun masalah ini dapat terkait dengan siapa saja, namun korban lebih identik dengan perdagangan perempuan di bawah umur, hal ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, perdagangan perempuan di

bawah umur lebih menonjol ke permukaan. Dalam film *Jamilah dan Sang Presiden* yang rilis pada tahun 2009 misalnya, melaporkan bahwa pada tahun 2007 negara kita menempati urutan ke-3 negara bermasalah dalam pemberantasan *human trafficking*, negara kita adalah negara transit dan tujuan, 30% prostitusi perempuan di negara kita berusia di bawah 18 tahun, 40.000 sampai 90.000 per tahun perempuan di bawah umur yang tinggal di negara kita menjadi korban kekerasan seksual dan perempuan di bawah umur yang berasal dari negara kita diperdagangkan untuk eksploitasi seksual terutama di asia timur tengah. Ironisnya negara kita mempunyai Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU Tindak Pidana Perdagangan Orang). SuaraSurabaya.net (2008), 217 kasus perkosaan terjadi di Jawa Timur. 75 persen diantaranya dialami oleh anak, baik perkosaan yang dilakukan oleh teman sebaya, tetangga, maupun keluarga. Sedangkan, 13 persen kekerasan pada anak terjadi dalam bentuk pelecehan seksual, 6 persen kekerasan pada masa pacaran. Dan 3 persen kasus *trafficking*. Kasus tersebut terjadi karena banyaknya orang dewasa yang memanfaatkan anak-anak di bawah umur. UNICEF (2009), melaporkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan berkisar antara 40.000 sampai 70.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.¹ Dalam hal ini keberadaan peraturan atau undang-undang tentang perlindungan anak dan pidana perdagangan manusia masih belum cukup

¹<http://khppia-unicef.org/index.php?hal=14&keyIdHead=3>

mengurangi *human trafficking*, serta undang-undang yang bisa memenuhi hak korban masih belum ada. Ini dapat menunjukkan betapa rentannya perempuan di bawah umur untuk diperdagangkan dan dengan pemberitaan akhir-akhir ini yang kita baca, lihat dan kita dengar di berbagai media di mana penculikan yang di iringi *human trafficking* menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapa saja.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu tatanan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan *statuta law* maupun *non statuta law*, dan hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak dalam upaya *human trafficking*.

Anak adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka Penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* (Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2009/PN Surabaya)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang penyusun angkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur korban *human trafficking*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan korban *human trafficking* agar bisa menjerat pelakunya dengan hukuman yang lebih berat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku *human trafficking* terhadap perempuan di bawah umur di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah *human trafficking*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional. Khususnya dalam rangka pembaharuan ketentuan hukum pidana (KUHP) di masa yang akan datang, serta memberi keadilan bagi para perempuan di bawah umur korban *human trafficking*.

2. Manfaat Praktis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah, instansi hukum yang terkait *human trafficking* dan para penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *human trafficking* agar dapat lebih memberikan keadilan bagi masa depan para korban.

E. Kajian Pustaka

1. Tindak Pidana *Trafficking*

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

- (1) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- (2) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat- syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :

- (1) Harus adanya suatu perbuatan.
- (2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
 - a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Harus berlawanan dengan hukum.
 - c. Harus tersedia ancaman Hukumannya.³

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut :

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, h 175.

³ Ibid, h 176.

- (1) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- (2) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- (3) Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.⁴

b. Pengertian *Human Trafficking*

Trafficking adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa. Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan illegal. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan.

Tahun 2000 di Palermo Italia, PBB membuat protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum *human trafficking*, terutama perempuan di bawah umur atau disebut juga sebagai Protokol Perdagangan. Protokol tersebut adalah set internasional pedoman diplomatik yang ditetapkan oleh PBB sebagai konvensi terhadap *trafficking* transnasional terorganisir. Maksud di balik definisi ini adalah untuk memfasilitasi konvergensi dalam kerjasama nasional dalam menyelidiki dan menuntut kasus *human trafficking*. Tujuan tambahan dari protokol adalah untuk melindungi dan membantu korban *human trafficking* dengan menghormati sepenuhnya hak asasi manusia mereka. Protokol

⁴ Hari Saherodji dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2001, h 28.

perdagangan mendefinisikan perdagangan manusia sebagai : perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Hal tersebut kemudian diratifikasi di Negara kita oleh UU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 ayat (1).

Eksplorasi mencakup eksploitasi dari prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh. Persetujuan dari korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang ditetapkan diatas tidak akan relevan jika salah satu cara yang ditetapkan diatas telah digunakan. Pada bulan Juni 2010 Protokol Perdagangan telah ditandatangani oleh 117 negara dan 137 pihak.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana *Trafficking*

Tindak pidana *trafficking* atau disebut dengan tindak pidana perdagangan orang atau *Trafficking in persons* merupakan kejahatan yang keji terhadap HAM, yang mengabaikan hak

seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Perempuan dibawah umur adalah yang paling banyak menjadi korban *trafficking in persons*, menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV. Kondisi perempuan di bawah umur yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

UU Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.

Ada 4 unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu :

1. Setiap orang dalam pasal tersebut mengacu pada pengertian Pasal 1 ayat (4) UU Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (6).
2. Tindakan pada Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dapat diambil penjelasannya pada Pasal 1 ayat (9) mengenai perekrutan yang berarti tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Sedangkan penerimaan dalam Pasal 1 ayat (10) disebutkan sebagai tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
3. Tindakan tambahan seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat memiliki artian yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (11) tentang kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan ancaman kekerasan sendiri memiliki pengertian yang berbeda dari kekerasan itu sendiri. Dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Kata penjeratan utang dalam hal ini memiliki arti sesuai yang tercantum pada Pasal 1 ayat (15) adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
4. Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup

dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

2. Tinjauan Umum Tentang Anak

Memahami dunia anak tidaklah mudah, terutama dalam mendidik dan mengarahkan mereka. Karena apa yang diterima oleh anak-anak saat masih kecil akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kepribadian mereka saat dewasa nanti. Oleh karena itu untuk memahaminya, perlu dipelajari terlebih dahulu tentang pengertian anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Serta jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.⁵

Pengertian dalam Kamus Hukum mengatakan bahwa anak adalah setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁶

⁵ Penjelasan Umum UU RI No.23 / 2002 tentang *perlindungan anak*.

⁶ Kamus Hukum, Wacana Intelektual, 2007 hal 32.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Selain itu, pengertian anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Para ahli yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, juga mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, dan anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.⁷

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu exist. Hal ini untuk menghindari keracunan mengenai pengertian anak dalam

⁷ Augustinus, *Pengertian Anak*, Suryabrata, Jakarta, 1987, hal.14.

hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Kesejahteraan Anak) menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat dengan BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".

Pengertian tentang anak secara *legal formal* dapat kita temukan dalam pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka (5) UU Perdagangan Orang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan".

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Peradilan Anak), pengertian anak

adalah : "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin." Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

Menurut UU Peradilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

3. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

Istilah wanita berasal dari bahasa Sansakerta, wanita, yaitu yang diinginkan oleh pria, sehingga berkonotasi negatif. Ungkapan yang ada mengatakan bahwa wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam dan menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharap untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang diakui perannya. Sedangkan istilah perempuan sengaja digunakan untuk istilah women, berasal dari akar bahasa melayu yang berarti empu atau induk, artinya

yang memberi hidup. Istilah ini tampak lebih dinamis dan syarat makna dibanding dengan istilah wanita.

Istilah tersebut berarti juga upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan meminimalisasi praktik diskriminasi gender, yang dianggap merugikan perempuan. Dengan sebutan perempuan ini, ia diharapkan tidak sekedar bisa menikmati kehidupan ini, tetapi sekaligus dapat memberdayakan potensi dirinya yang berkaitan dengan kepentingan yang bersifat makro.

4. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 55 KUHP.

(1) Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

b. Pasal 56 KUHP.

(1) Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan :

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pada Pasal 55 disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

a. *Pleger*

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.

b. *Doen plegen*

Disini sedikitnya ada dua orang, *doen plegen* dan *pleger*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.

c. *Medpleger*

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah *pleger* dan *medpleger*. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medpleger*, akan tetapi dihukum sebagai *medeplichtige*.

d. *Uitlokker*

Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.⁸

Sedangkan pada Pasal 56 dapat di jelaskan bahwa seseorang adalah *medeplichtig*, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau heling sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221.

⁸ R. Soesilo, *KUHP dengan Penjelasan*, Politea, Bogor, 1973, hal.62.

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan *uitlokking*.

Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan *medplegen* dalam Pasal 55.⁹

5. Faktor Penyebab Terjadinya *Trafficking*

Ada beberapa hal yang menyebabkan *Human Trafficking* di dunia setiap tahun jumlahnya semakin meningkat. Secara umum ada 2 faktor yang mendorong terjadinya *Trafficking* perempuan dibawah umur antara lain seperti :

a. Faktor Internal

(1) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor pendorong utama yang mempengaruhi terjadinya *trafficking* akan tetapi hal ini bukan satu-satunya faktor, karena ada pula warga yang meskipun miskin, tetapi tetap dapat mencari mata pencaharian secara halal. Karena sulitnya lapangan kerja akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menimbulkan banyak orang yang

⁹ R. Soesilo, *KUHP dengan Penjelasan*, Politea, Bogor, 1973, hal.62.

berusaha mengambil jalan pintas untuk memperoleh keuntungan finansial salah satunya dengan cara *Trafficking* tersebut.

(2) Sosial

Orang tua selalu mempunyai harapan agar anak-anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik dan tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Namun jika keadaan orang tua dalam keluarga tidak harmonis atau bahkan sampai terjadi perceraian, maka aspek moral perkembangan anak pun secara tidak langsung akan terganggu. Akibat timbulnya perceraian dalam keluarga, banyak anak yang hidupnya tidak terkontrol dan perkembangan moralnya menjadi sangat labil sehingga mereka mudah terseret dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat menjerumuskan mereka.

b. Faktor Eksternal

(1) Pendidikan

Pendidikan sangatlah dibutuhkan oleh semua orang terutama para pemuda untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompetitif.¹⁰ Apabila faktor pendidikan tersebut masih banyak diabaikan oleh masyarakat, maka tidak

¹⁰ Lopian Gandhi L.M dan Geru Hetty A, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hal 86.

heran jika banyak perempuan dibawah umur yang mudah diperdayai oleh para sindikat untuk diperdagangkan dengan berbagai motif.

(2) Permintaan dari *Traffickers*

Faktor ini adalah faktor permintaan dari *child traffickers* itu sendiri. Banyak *traffickers* dari luar negeri yang datang menipu orang tua yang pada akhirnya mengajak anak-anaknya untuk ditukar sebagai alat untuk membayar hutang atau menjanjikan pekerjaan yang benar dan layak. Seperti yang terjadi di negara Thailand, pekerja seksual anak sangat terkenal dan dijadikan satu aktivitas untuk turisme dari luar negeri. Karena besarnya permintaan tersebut, maka banyak anak-anak yang diperdagangkan demi *sex tourisme* ini. Ironisnya, faktor permintaan ini pun pada akhirnya melibatkan aparat-aparat militer atau kepolisian dari negara itu sendiri untuk membantu dalam memperdagangkan anak-anak untuk menjadi pekerja seksual.

(3) Pergaulan

Faktor pergaulan sangatlah memegang peranan dalam kasus ini, karena pergaulan adalah salah satu aspek yang berperan dalam membentuk suatu individu itu sendiri, serta pola pikir anak juga tergantung bagaimana keadaan sekitar pergaulan anak. Dengan kelabilan emosi pada jiwa anak yang

sedang berkembang, rasa ingin tahu dalam diri anak itu sendiri menjadi besar. Ironisnya jika anak itu sendiri mempunyai pergaulan yang buruk maka tidak menutup kemungkinan anak itu ingin mencoba apa yang telah dia lihat dalam pergaulannya dan pada akhirnya terjerumus pada perdagangan anak itu sendiri.

(4) Konsumtif

Faktor ini merupakan faktor yang menjerat gaya hidup anak remaja, sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini. Karena terlalu konsumtif terhadap suatu barang, mengakibatkan anak selalu ingin memperoleh suatu barang yang diinginkan serta tidak akan pernah puas, sehingga menyebabkan anak berpikir untuk memenuhi semua keinginannya dan memenuhi gaya hidupnya yang konsumtif dengan berbagai cara, meskipun dengan cara yang beresiko dengan tujuan hanya untuk memperoleh uang banyak dengan cara mudah dan cepat.

(5) Media Massa

Media masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang *Trafficking*, dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan

bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *Trafficking* dan kejahatan susila lainnya.

6. Upaya Hukum

Yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun maksud dari upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah :

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
- b. Untuk kesatuan dalam peradilan.¹¹

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan bagi terdakwa ataupun masyarakat bahwa peradilan, baik menurut fakta maupun hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

Adapun berdasarkan ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang berkepentingan, karena itu pula pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, h 234.

untuk itu jika ia menghendakinya. Hakim tidak dapat memaksa atau menghalanginya.

Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum secara Preventif dan upaya hukum secara Represif.

a. Upaya Hukum secara Preventif

Menurut Kansil preventif mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a. Preventif Pasif, yaitu semua kegiatan atau tindakan usaha dari penegak hukum atau siapa saja yang terkait untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dengan cara mengadakan kegiatan penampilan fisik.
- b. Preventif Aktif, yaitu kegiatan usaha kerja dari penegak hukum yang dilakukan dengan lebih meningkatkan secara aktif.¹²

Pengertian preventif pada dasarnya mempunyai pengertian sempit yang berarti pencegahan, dan secara luasnya yaitu tindakan yang bersifat mencegah atau meminimalisasi suatu masalah. Maka pengertian dari upaya preventif terhadap tindak pidana perdagangan anak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan meminimalisasi suatu masalah tindakan pidana perdagangan anak.

¹² C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1994, h 94-95

Perdagangan anak dalam dekade terakhir ini meningkat karena beberapa faktor diantaranya adalah adanya kelemahan pada perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) di Indonesia misalnya disebabkan oleh banyaknya peraturan yang sulit untuk diterapkan pada kasus-kasus perdagangan anak yang berhasil diungkap oleh aparat dan juga adanya faktor-faktor di luar peraturan perundang undangan misalnya masih kurangnya pengertian tentang perdagangan orang itu sendiri dari pihak korban. Dengan adanya faktor-faktor yang ada diatas dapat menyebabkan peningkatan yang pesat terhadap perdagangan anak itu sendiri.

Berkembangnya tindak pidana perdagangan anak, secara tidak langsung juga berdampak pada kehidupan negara kita, oleh karena itu semua pihak baik pemerintah atau masyarakat harus saling berkerjasama guna meminimalisasi berkembangnya tindak pidana perdagangan anak ini. Dengan ini maka salah satu upaya untuk memberantas atau meminimalisasi tindak pidana perdagangan anak adalah dengan melakukan pencegahan (preventif). Adapun alasan untuk melakukan pencegahan perdagangan anak sebagai berikut :

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis serta lebih

ekonomis bila dibandingkan dengan represif dan rehabilitasi.

2. Usaha pencegahan dapat pula mempercepat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.
3. Usaha pencegahan dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seorang anak.

Sebagaimana disebutkan pada alasan-alasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dari awal lebih baik daripada harus menanggulangi masalah yang sudah terjadi khususnya dalam perkara tindak pidana perdagangan anak.

b. Upaya Hukum secara Represif

Menurut Kansil represif adalah suatu upaya penanggulangan suatu tindak pidana atau kejahatan dengan cara mengambil tindakan kepolisian atau tindakan hukum, antara lain disidik, diperiksa dan ditangkap.¹³

Upaya Represif mempunyai arti yaitu suatu tindakan yang bersifat penahanan, penekanan atau penegakan sehingga

¹³ C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1994, h 95

suatu masalah yang telah muncul di permukaan tidak menimbulkan dampak lainnya yang lebih luas.

Melihat masalah tindak pidana perdagangan anak sebagai suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri. Tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah tersebut diatas tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan dan keprihatinan, karena perdagangan anak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi seorang anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari orang tuanya, tetapi malah sebagai barang dagangan yang dapat dijual belikan dan diperlakukan dengan semena-mena oleh orang tuannya. Untuk itulah upaya represif ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat dengan mengambil tindakan yang berlandaskan undang-undang maupun pasal yang berlaku.

7. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mempunyai pengertian yang berarti segala usaha pemerintah dan masyarakat untuk menjamin setiap

manusia dalam menjalankan semua fungsi dan kewajiban, serta memperoleh haknya sesuai dengan norma-norma atau aturan yang ada.

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.

Berarti dengan melihat pengertian diatas maka bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah salah satu langkah untuk mencegah suatu permasalahan dan menaggulangnya dengan suatu norma-norma atau ketentuan yang ada.

8. Sifat Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dari sifatnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Pasif

Berupa tindakan selain proses peradilan yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk kebijaksanaan berkaitan dengan hak pelaku maupun korban.

2. Perlindungan Hukum Aktif

Perlindungan hukum yang dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak. Perlindungan hukum aktif ini dapat dibagi lagi menjadi aktif preventif dan aktif represif

(1) Aktif Preventif

Perlindungan hukum berupa hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah.

(2) Aktif Represif

Perlindungan hukum berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan.

9. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hal tersebut termuat dalam KUHAP Pasal 1 ayat (11). Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan yang dikeluarkan atas sengketa mengenai wewenang mengadili suatu perkara.

e. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatakan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

f. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Pasal 143 ayat (3) menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

10. Banding

Dari segi formal, pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. Jadi secara yuridis formal, undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan

pemeriksaan putusan pengadilan tingkat pertama di pengadilan tingkat banding.

Putusan yang diambil pengadilan tingkat banding adalah putusan tingkat terakhir. Pengadilan tinggi sebagai institusi pengadilan tingkat banding merupakan instansi pengadilan tingkat kedua dan terakhir.

Upaya banding yang secara formal dibenarkan undang-undang merupakan upaya hukum biasa, bukan upaya hukum luar biasa. Disamping banding merupakan upaya hukum yang dibenarkan undang-undang dan sifat upaya banding merupakan upaya hukum biasa, ditinjau dari segi yuridis, upaya banding adalah hak yang dibenarkan undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan pengadilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap putusan yang dapat dibanding seperti yang ditentukan Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHP. Pasal 67 menyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kuarang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Sedangkan pasal 233 ayat (1) mengatakan permintaan banding sebagai mana dimaksud dalam Pasal

67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

Ditinjau dari segi tujuan secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
- b. Mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁴

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan dan teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana human trafficking

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal 87

yang di atur sesuai dengan undang-undang nomor. 21 tahun 2007 tentang pidana perdagangan manusia dan penyelesaian perkara *human trafficking* terhadap perempuan di bawah umur di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan KUHP.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

(3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

(4) *Burgerlijk Wetboek* (BW)

(5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

(6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

(7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

(8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

(9) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pidana Perdagangan Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, koran, tabloid, laporan penelitian hukum, televisi, internet serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengkajian ilmu hukum, metode atau cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara pengumpulan data pada disiplin ilmu lain. Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum Normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan melakukan studi kepustakaan yaitu penelitian yang diperoleh dengan membaca literatur yang ada kaitannya dengan tema. Dalam penelitian ilmu hukum Normatif untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal 166

penelitian. Berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang telah diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan dokumen khusus yang menarik untuk diteliti yang kasus tindak pidana perdagangan anak. Dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.¹⁶

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini maka sistematika penulisan terdiri dari 4 Bab yaitu :

Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal 174

Pada Bab II menguraikan tentang perlindungan hukum korban human trafficking pada kasus pidana dengan No. Perkara : 1007/Pid. B/2009/P.N. SURABAYA. Dan dalam bab II ini terdiri dari 2 sub bab, yaitu mengenai disposisi kasus yang akan menjelaskan tentang identitas para korban, dakwaan jaksa penuntut umum dan tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum serta sub bab yang ke-2 adalah mengenai analisa perlindungan hukum kasus pidana dengan No. Perkara : 1007/Pid. B/2009/P.N. SURABAYA.

Pada Bab III menguraikan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban *human trafficking*. Dalam bab III yang terdiri dari 3 sub bab ini penyusun akan menjelaskan tentang upaya hukum bagi korban *human trafficking*, baik itu secara Preventif dan Represif serta analisa upaya hukum terhadap kasus pidana dengan No. Perkara : 1007/Pid. B/2009/P.N. SURABAYA.

Pada Bab IV menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran. Bab ini menyimpulkan berbagai permasalahan yang telah dibahas dan kemudian diuraikan secara jelas lalu diberi saran yang bermanfaat tentang permasalahan yang telah dibahas, yang merupakan hasil dari tulisan serta berisi tentang rekomendasi yang telah dipaparkan dalam bentuk saran.